



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.1/Kep.275-Org/V/2025

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien, perlu ditetapkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Berita Acara Nomor 000.8.1/58/SETDA.Org, tanggal 12 Maret 2025 tentang Penyesuaian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- KEDUA : Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 000.8.2/Kep.471.Org/IX/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.298-Org/VI/2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 - b. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 000.8.1/Kep.1-Org/I/2025 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 Mei 2025

WALI KOTA BEKASI,



TRIADHANTO TJAHYONO

Tembusan Yth:

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

**PETA JABATAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI**

SEKRETARIS DPRD KOTA BEKASI
14

KEPALA BAGIAN UMUM					
12					
Jabatan	Kelas	Bezzeting		K	+/-
		PPPK	PNS		
Arsiparis Ahli Muda	9	0	0	1	-1

KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN					
12					
Jabatan	Kelas	Bezzeting		K	+/-
		PPPK	PNS		
Perencana Ahli Muda	10	0	1	1	0
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	0	1	1	0
Penata Layanan Operasional	7	5	7	17	-5
Pengelola Layanan Operasional	6	0	2	2	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	0	3	-1

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN					
12					
Jabatan	Kelas	Bezzeting		K	+/-
		PPPK	PNS		
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10	0	1	1	0
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	1	0
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	0	1	1	0
Penata Layanan Operasional	7	12	7	19	0
Pengelola Layanan Operasional	6	0	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	8	0	8	0

KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN					
12					
Jabatan	Kelas	Bezzeting		K	+/-
		PPPK	PNS		
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	2	-1
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	0	1	1	0
Penata Layanan Operasional	7	23	5	28	0
Pengelola Layanan Operasional	6	1	0	2	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	3	1	4	0

KASUBAG TU DAN KEPEGAWAIAN					
9					
Jabatan	Kelas	Bezzeting		K	+/-
		PPPK	PNS		
Arsiparis Ahli Pertama	8	0	1	1	0
Penata Layanan Operasional	7	22	6	28	0
Pengelola Layanan Operasional	6	4	0	5	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	11	3	14	0

KASUBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN					
9					
Jabatan	Kelas	Bezzeting		K	+/-
		PPPK	PNS		
Penata Layanan Operasional	7	3	3	6	0
Pengelola Layanan Operasional	6	0	2	2	0
Operator Layanan Operasional	5	2	1	4	-1

WALI KOTA BEKASI,

TTD

TRI ADHIAN TO TJAHYONO